

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Manusia merupakan makhluk yang secara naluri memiliki hasrat untuk hidup damai dan teratur. Terkadang apa yang dianggap teratur oleh seseorang yang berbeda dengan persepsi manusia lainnya. Oleh karena itu sebagai makhluk sosial (*zoom politicon*) yang senantiasa hidup bersama dengan sesamanya, maka manusia membutuhkan suatu perangkat atau patokan hidup agar tidak terjadi pertentangan.

Perangkat yang mengatur agar manusia dapat hidup teratur bersama manusia lain disebut dengan hukum. Hukum merupakan suatu perangkat yang keberadaannya sangat esensial sifatnya dapat menjamin kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Hal ini terkandung dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Indonesia merupakan Negara yang Demokratis berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia, menjamin semua warga Negara di dalam hukum dan di dalam pemerintahan serta wajib menjunjung hukum beserta pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Oleh karena itu Negara Indonesia yang merupakan negara hukum telah memiliki peraturan yang mengatur segala aspek dalam kehidupan masyarakat. Berdasarkan sila

kelima dalam Pancasila sebagai satu kesatuan bulat, adanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Untuk mencapai suatu keadilan dalam masyarakat maka diperlukannya suatu aturan. Jika terdapat tindak pidana dalam suatu keadaan dan menimbulkan korban, maka korban tersebut untuk mendapat suatu keadilan dapat melalui jalur hukum.

Menurut Muhammad Taufik Makarao¹ :

“Pidana adalah suatu penderitaan dari pidana yang berwenang sebagai hukuman (sesuatu yang meliputi pencabutan dan penderitaan) yang dikenakan kepada seorang pelaku karena sebuah pelanggaran.”

Jadi pidana itu adalah suatu tindakan yang memiliki atau bersifat merugikan seseorang dan tindakan tersebut memiliki suatu sanksi.

Seorang anak yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum pidana juga mengalami proses pembuktian di persidangan yang dikenal dengan pengadilan anak, untuk memberikan sanksi kepada anak. Tak jarang juga anak yang diberikan sanksi pidana

Menurut Kartini Kartono²:

“Pekerja seks komersial merupakan peristiwa menjual diri baik perempuan maupun laki-laki dengan jalan memperjualbelikan

¹ Muhammad Taufik Makarao, *Pembaharuan hukum Pidana Indonesia, Studi Tentang bentuk-Bentuk Pidana Khususnya Pidana Cambuk Sebagai Suatu Bentuk Pemidanaan*, Kreasi Wacana, Yogyakarta, 2005, hlm. 18.

²Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, PT Raja Grafindo Persada , Jakarta, 2011, hlm. 216.

badan, kehormatan dan kepribadian kepada banyak orang untuk memuaskan nafsu-nafsu seks dengan imbalan pembayaran.”

Dalam kasus ini yang menjadi pelaku tindak pidana perdagangan anak ialah muncikari yang masih berstatus anak atau masih di bawah umur.

Perdagangan anak di Indonesia beberapa waktu ini semakin marak terjadi, baik dalam lingkup domestik maupun yang telah bersifat lintas batas Negara. Perdagangan orang yang sangat menonjol terjadi adalah perdagangan anak dan perempuan yang dikaitkan dengan perdagangan seksual, yang saat ini mulai menjadi perhatian masyarakat.

Perdagangan orang bukan merupakan fenomena baru di dunia, bahkan ada negara-negara yang dianggap sebagai negara paling besar didalam terjadinya kejahatan perdagangan orang salah satunya adalah Indonesia. Anak-anak merupakan pihak yang rentan menjadi korban perdagangan orang (*trafficking*) dan *eksploitasi*. Perlindungan terhadap hak anak merupakan hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi negara Undang – Undang Dasar Republik Indonesia yaitu pada Pasal 28B ayat (2).

Contohnya saat ini terjadi tindak pidana perdagangan anak yang dilakukan oleh anak yang kemudian di eksploitasi baik seksual ataupun eksploitasi ekonomi dan banyak modus lainnya.

Salah satu contoh kasus mengenai Perdagangan anak yaitu:³

Terjadi di Padalarang Kabupaten Bandung Barat. Meski masih di bawah umur, MR (16) telah menjadi muncikari. Akibat perbuatannya itu ia kini terpaksa harus meringkuk di balik jeruji

³Tribunnews Jabar, Gadis Berusia 16 Tahun Jadi Muncikari, Begini Kasusnya Terungkap, <http://www.tribunnews.com/regional/2018/03/02/gadis-berusia-16-tahun-jadi-muncikari-begini-kasusnya-terungkap?page=1>, diunduh tanggal 5 Maret 2018 pukul 10.00 WIB.

besi Polres Cimahi. MR dididik anggota Satuan Reserse Kriminal Polres Cimahi karena terjerat kasus tindak pidana perdagangan anak. Penangkapan tersebut berawal dari laporan masyarakat tentang praktik perdagangan anak di bawah umur yang dijual untuk dijadikan Pekerja Seks Komersial (PSK) di kawasan Padalarang.

Atas informasi tersebut polisi menangkap MR, ketika menjual korban inisial DK dan NR dengan harga Rp 1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah). MR dididik polisi pada Rabu (28/2/2018) di kontrakkannya di Kampung Sodong, Desa Cipendeuy, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Kasatreskrim Polres Cimahi, AKP Niko N Adiputra, mengatakan tersangka telah menjalankan prostitusi dan menjadi muncikari itu selama dua tahun dan menawarkan kepada konsumen yang dikenalnya.

“Beberapa anak yang diperdagangkan tersangka di antaranya ada korban yang merupakan adik kelasnya,” ujar AKP Niko N Adiputra di Mapolres Cimahi, Jalan Amir Machmud, Jumat (2/3/2018). Untuk korbannya, kata Niko rata-rata dari Cimahi dan Bandung Barat dan dari hasil penyelidikan dua orang telah diperdagangkan dengan usia masih 15 tahun.

“Kami tetapkan dia (tersangka) dengan modus memberikan satu jasa layanan prostitusi dan sebagai muncikari,” kata Niko. Bersama dengan penangkapan terhadap MR, pihak kepolisian juga mengamankan dua korban gadis di bawah umur dan tiga korban lainnya masih dalam pengejaran polisi. Sebagai bukti dari tangan tersangka polisi mengamankan uang Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan barang bukti tiga buah ponsel dan dua unit sepeda motor.

Berdasarkan uraian masalah kasus tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul

“PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA BAGI ANAK BERSTATUS MUNCIKARI DALAM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN SEKS KOMERSIAL ANAK DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG”.

B. Identifikasi Masalah

1. Faktor apa yang menyebabkan anak berstatus muncikari melakukan tindak pidana perdagangan orang untuk seks komersial ?
2. Apakah peran aparat penegak hukum tanggap terhadap penyelesaian kasus tindak pidana yang dilakukan muncikari tersebut?
3. Bagaimana upaya penyelesaian pertanggung jawaban tindak pidana perdagangan anak yang dilakukan oleh muncikari dibawah umur ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui, mengkaji faktor apa yang menyebabkan anak berstatus muncikari melakukan tindak pidana perdagangan orang untuk seks komersial;
2. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis Apakah peran aparat penegak hukum tanggap terhadap penyelesaian kasus tindak pidana yang dilakukan muncikari tersebut;
3. Untuk mencari solusi pemecahan masalah pertanggung jawaban anak atas penyelesaian tindak pidana perdagangan anak yang dilakukan oleh muncikari dibawah umur.

D. Kegunaan Penelitian

Penulis menetapkan dua kegunaan dalam penelitian yang akan dilakukan, yaitu kegunaan akademis dan kegunaan praktis:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi karya ilmiah yang dapat ditelaah dan dipelajari lebih lanjut dalam rangka pengembangan ilmu Hukum, khususnya berkaitan dengan perdagangan anak yang dilakukan muncikari anak.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pembuat kebijakan dalam hal ini pemerintah Indonesia serta pihak-pihak lain yang terkait dengan penegakan hukum dalam menangani pertanggung jawaban pidana bagi anak yang menjadi muncikari dalam tindak pidana perdagangan anak yang dijadikan pekerja seks komersial.

E. Kerangka Pemikiran

Sebagai dasar untuk penulisan skripsi ini penulis melakukan hal-hal sebagai berikut :

Berdasarkan empat (4) pilar kebangsaan memiliki beberapa point penting yang mempunyai makna mengenai pedoman berbangsa dan bernegara diantaranya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Bab I tentang bentuk dan kedaulatan, Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa⁴:

⁴Undang-Undang Dasar 1945, Penabur Ilmu, 1945, hlm. 7.

“Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik”

Negara Indonesia yaitu negara yang bersifat demokrasi yang di pimpin oleh Presiden yang di pilih langsung oleh rakyat untuk rakyat.

Negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah negara yang dibentuk berdasarkan semangat kebangsaan (nasionalisme), yaitu tekad warga negara Indonesia untuk membangun dan memajukan masa depan bangsa walaupun berbeda ras, agama, budaya, suku, serta adat istiadat, terdapat fungsi dari NKRI yaitu fungsi kesejahteraan dan kemakmuran.

Sesuai dengan yang terdapat dalam Bhinneka Tunggal Ika yang merupakan semboyan Negara Indonesia sebagai dasar untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan Indonesia dalam amandemen keempat Undang-Undang dasar Tahun 1945 dikukuhkan sebagai semboyan resmi yang terdapat dalam Lambang Negara, Tercantum dalam Pasal 36 A Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

“Lambang Negara ialah Garuda Pacasila dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika”

Indonesia merupakan negara maritim yang memiliki beragam budaya dan terdiri dari beberapa pulau. Untuk menyatukan Indonesia maka di buat sebuah semboyan Bhineka Tunggal Ika yang artinya berbeda – beda tetap satu jua.

Kita harus menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari yaitu hidup saling menghargai antara masyarakat yang satu dengan yang lainnya.

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea 4⁵:

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Selama Orde Baru (1966-1998), Pemerintah berjanji akan melaksanakan UUD 1945 dan Pancasila secara konsekuen dan murni. Akibatnya Selama Orde Baru, UUD 1945 menjadi sangat “sakral”, diatur dalam Keputusan No.I/MPR/1983 yang menyatakan bahwa MPR berketetapan untuk mempertahankan UUD 1945, tidak berkehendak akan melakukan amandemen terhadapnya

Pada masa ini dikenal masa transisi. yaitu masa sejak Presiden Soeharto digantikan oleh B.J.Habibie sampai dengan lepasnya Provinsi Timor Timur (Sekarang Timor Leste) dari NKRI.Salah satu permintaan Reformasi pada tahun 1998 adalah adanya amendemen atau perubahan terhadap UUD 1945.

Menurut Kaelan⁶ :

“Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sebagai sumber tertib hukum Indonesia maka Pancasila

⁵Undang-Undang Dasar 1945, Penabur Ilmu, 1945, hlm. 5.

⁶Kaelan, *Pendidikan Pancasila*, Paradigma, Yogyakarta, 2004, hlm. 83.

tercantum dalam ketentuan tertinggi yaitu Undang-Undang Dasar 1945.”

Pancasila merupakan sumber kaidah hukum yang mengatur negara Republik Indonesia serta menjadi pijakan penyelenggaraan negara dan seluruh kehidupan negara Republik Indonesia.

Menurut H.R. Otje Salman dan Anton F Susanto⁷:

Dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 Amandemen ke IV yaitu “Negara Indonesia adalah negara hukum (*rechtstaat*) secara yuridis hal itu mengandung pengertian seberapa besar kemampuan hukum untuk dapat memberikan manfaat kepada masyarakat karena hukum dibuat oleh negara dan ditujukan untuk tujuan tertentu”.

Negara Indonesia merupakan Negara Hukum yang menghasilkan suatu perundang-undangan yang dibuat sesuai dengan masyarakat Indonesia dan diberlakukan untuk seluruh masyarakat Indonesia

Dalam pembukaan Undang- Undang Dasar 1945 amandemen ke-4 alinea IV yang kemudian dijabarkan dalam Pasal 1 ayat (3) yaitu :

“Negara Indonesia adalah Negara Hukum”

Bahwa segala aspek kehidupan dalam bermasyarakat, kenegaraan dan pemerintahan harus senantiasa di dasarkan oleh hukum.

Sebagai landasan selanjutnya ketentuan perundang-undangan dalam hukum pidana, dikenal adanya asas legalitas Menurut Moeljatno, yang ada

⁷H.R. Otje Salman dan Anton F Susanto, *Teori Hukum (mengingat, mengumpulkan, dan membuka kembali)*, Refika Aditama, Bandung, 20114, hlm. 156.

dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada Pasal 1 ayat (1) yang menyebutkan bahwa⁸:

“Tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana apabila belum ada aturan yang mengatur tentang perbuatan tersebut”.

Didalam Pasal 1 ayat (1) KUHP dikenal dengan asas legalitas yang mengandung tiga pengertian yaitu :

1. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam aturan undang-undang;
2. Larangan terhadap penafsiran terhadap perbuatan pidana atau tindak pidana;
3. Aturan-aturan hukum pidana tidak boleh berlaku surut atau non retro aktif.

Penegakan hukum pidana juga harus ditegakkan dalam tindak pidana perdagangan orang atau anak yang terjadi di Indonesia, yang diatur dalam Pasal 297 KUHP yang isinya :

“Perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun.”

Dalam Pasal 297 KUHP, bagi seorang muncikari yang melakukan perdagangan anak dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun.

Di dalam Pasal 324 KUHP yang isinya:

“Barangsiapa dengan biaya sendiri atau biaya orang lain menjalankan perniagaan budak atau melakukan perbuatan

⁸Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2005, hlm. 3.

perniagaan budak atau dengan sengaja turut serta secara langsung atau tidak langsung dalam salah satu perbuatan tersebut diatas diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun.”

Dalam Pasal 324 KUHP ini di jelaskan bahwa siapapun dapat dikenakan pasal ini apabila seseorang tersebut melakukan sesuatu perbuatan yang secara jelas diatur dalam pasal 324 KUHP di atas.

Undang-Undang No.21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 1 angka 1 memberikan definisi perdagangan orang sebagai berikut:

“Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi”

Perdagangan orang adalah bentuk modern dari perbudakan manusia, perdagangan orang juga merupakan salah satu bentuk perlakuan terbaru dari pelanggaran harkat dan martabat manusia.

Definisi anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 1 :

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”

Dalam kasus ini yang di maksud muncikari adalah anak yang masih berusia 16 tahun, maka muncikari tersebut di kategorikan sebagai anak.

Menurut Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang

Perlindungan Anak⁹ :

“Perdagangan anak adalah rekrutmen, transportasi, pemindahan, penyembunyian atau penerimaan seseorang anak untuk tujuan eksploitasi, didalam atau negara yang mencakup, tetapi tidak terbatas pada prostitusi anak, pornografi anak dan bentuk lain dari eksploitasi seksual, pekerja anak, kerja paksa atau pelayanan, perbudakan atau praktek lain yang menyerupai perbudakan, penghambatan, pemindahan atau penjualan organ tubuh, penggunaan aktivitas terlarang/tidak sah dan keikutsertaan dalam konflik bersenjata.”

Perdagangan anak adalah suatu bentuk dari perebutan hak dan perbudakan manusia, perdagangan anak juga merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia yang seharusnya anak tersebut masih dibawah pengampuan orang tuanya malah diperbudak hanya demi mendapatkan suatu keuntungan materil.

Menurut Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang

Kesejahteraan Anak:

“Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.”

Anak merupakan seseorang yang masih dibawah umur atau belum cakap menurut hukum

Menurut Imam Al Ghazali¹⁰:

⁹Tim Jaringan Indonesia ACT, *Panduan Nasional Melindungi Hak dan Martabat Anak Diperdagangkan di Indonesia*, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta, 2010, hlm 43-44.

¹⁰Syamsul Yusuf LN, *Mental Hygiene Kajian Psikologi Agama*, Jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan Fakultas Pendidikan UPI Bandung, Bandung, 2003.

“Anak merupakan amanah bagi orang tua yang masih suci laksana permata baik buruknya anak tergantung pada pembinaan yang diberikan oleh orang tua kepada mereka”

Untuk mengetahui sikap seorang anak tergantung bagaimana orang tua mendidik anak tersebut apakah baik atau buruk.

Menurut Wagianti Sutedjo dan Melani¹¹:

“Anak memiliki hak-hak atas perlindungan hukum, hal tersebut tercantum dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta pengaturan tentang hak-hak anak dan perlindungannya ini terpisah dalam peraturan perundang-undangan, antara lain:”

Jadi anak itu sejak lahir memiliki hak atas perlindungan dirinya dengan perlindungan hukum, hal ini telah diatur dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

1. Dalam bidang Hukum dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, diatur dalam Pasal 1 yaitu berisikan;
 - a. Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana
 - b. Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

¹¹Wagianti Sutedjo dan Melani, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2013, hlm. 49-50.

- c. Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Anak memiliki suatu kasus yang bertentangan dengan hukum yang berlaku maka akan diselesaikan atau penyelesaiannya melalui peradilan anak.

2. Dalam bidang Tenaga kerja dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 Tentang pengesahan Konvensi ILO Mengenai Usia Minimum untuk diperbolehkan bekerja yaitu berisikan;

Pasal 68 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
Pengusaha dilarang mempekerjakan anak.

Anak dilarang untuk bekerja

Pasal 69 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

- 1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dapat dikecualikan bagi anak yang berumur antara 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental dan sosial.
- 2) Pengusaha yang mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi persyaratan :
 - a) izin tertulis dari orang tua atau wali;
 - b) perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali;
 - c) waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam;
 - d) dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah;
 - e) keselamatan dan kesehatan kerja;
 - f) adanya hubungan kerja yang jelas; dan
 - g) menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- 3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, b, f dan g dikecualikan bagi anak yang bekerja pada usaha keluarganya.

Dalam Undang-undang ini telah dijelaskan dengan jelas bahwa usia minimum untuk bekerja antara usia 13 sampai 15 tahun dengan catatan pekerjaan tersebut tidak mengganggu perkembangan si anak.

Pasal 74 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

- 1) Siapapun dilarang mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan-pekerjaan yang berburuk.
- 2) Pekerjaan-pekerjaan yang terburuk yang dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
 - a) segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya.
 - b) segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau menawarkan anak untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno, atau perjudian.
 - c) segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan atau melibatkan anak untuk produksi dan perdagangan minuman keras, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya; dan/atau semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak.
- 3) Jenis-jenis pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf d ditetapkan dengan Keputusan Menteri

Dalam Pasal ini dijelaskan bahwa dilarang melakukan pekerjaan buruk.

Asas legalitas memegang peranan penting dalam hukum pidana. Tidak hanya itu, asas ini juga sebagai dasar dalam pembuatan berbagai undang-undang dan sebagai acuan penegak hukum dalam menegakkan hukum yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana, asas ini juga sebagai dasar bagi hakim dalam mengambil peranan dan putusan dalam peradilan pidana. Hakim tidak

boleh menjatuhkan hukuman atas sesuatu peristiwa yang tidak dengan tegas disebut dan diuraikan dengan undang-undang.

Menurut Anis Hamim dan Ruth Rosenberg¹² :

“Perlindungan anak-anak terhadap segala aktifitas yang hendak mengeksploitasi secara ilegal pada hakikatnya merupakan salah satu bentuk perlindungan Hak Asasi Manusia, sebagai suatu hak yang melekat pada manusia, yang diperoleh sejak lahir dan pemberian Tuhan, yang tidak dapat dikurangi. Setiap bentuk perdagangan perempuan dan anak merupakan pelanggaran hak asasi manusia (HAM), hak anak dan hak buruh yang memperlakukan korban semata sebagai komoditi yang dibeli, dijual, dikirim, dan dijual kembali. Fenomena yang berlaku di seluruh dunia ini terus berkembang dan berubah dalam bentuk dan kompleksitasnya yang tetap hanyalah kondisi eksploitatif yang ditempatkannya terhadap manusia”

Anak sebagai suatu aset atau suatu penerus bangsa maka anak itu haruslah dilindungi dari segala bentuk tindak pidana. Karena anak sejatinya dari dirinya dilahirkan sudah memiliki hak untuk dilindungi dari beragam tindak pidana.

Menurut J.E Sahetapy¹³:

“Eksplotasi terhadap perempuan dan anak-anak dari tahun ke tahun cenderung mengalami peningkatan baik secara kuantitatif maupun kualitatif, sehingga keterlibatan semua komponen masyarakat untuk turut mengatasinya maraknya perdagangan manusia merupakan faktor yang sangat penting. Mengenai fenomena meningkatnya kejahatan baik secara kuantitatif maupun kualitatif, Frank Tannenbaum, sebagaimana dikutip oleh J.E Sahetapy, menyatakan, *crime is eternal-as eternal as society*, artinya di mana ada manusia di sana pasti ada kejahatan.”

¹²Anis Hamim dan Ruth Rosenberg, *Kajian Perundang-Undangan Indonesia, Dalam Perdagangan Perempuan dan Anak di Indonesia*, USAID, Jakarta, 2003.

¹³J.E.Sahetapy, *Kausa Kejahatan*, Pusat Studi Kriminologi Fakultas Hukum Unair, 1979, hlm.1.

Eksplotasi terhadap kaum lemah semakin mengalami peningkatan karena adanya kehidupan yang semakin meningkat yang pasti jumlah tindak pidana atau suatu kejahatan pun anak meningkat.

Menurut Rahayu dalam tulisannya tentang perlindungan hukum terhadap korban perdagangan orang menyatakan¹⁴ :

“Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kemanfaatan dan kedamaian.”

Perlindungan hukum diberikan kepada subjek hukum sesuai dengan konsep hukum.

Menurut Rika Saraswati¹⁵ :

“Memberikan perlindungan kepada anak merupakan tindakan yang tepat, karena anak-anak yang dikategorikan sebagai kelompok yang rentan (*vulnerable groups*) disamping kelompok rentan lainnya, seperti pengungsi (*refugees*), pengungsi dalam negeri (*internally displaced persons*), kelompok minoritas (*national minorities*), pekerja migran (*migrant workers*), penduduk asli pedalaman (*indigenous people*) dan perempuan (*women*).”

Anak dan perempuan merupakan kaum lemah, maka sangat tepat bila memberikan perlindungan terhadap anak-anak dan wanita.

Menurut Siswanto Sunarsono¹⁶:

¹⁴Rahayu, *Perdagangan Orang*, etd.eprints.ums.ac.id, hlm.1.

¹⁵Rika Saraswati, *Hukum perlindungan Anak di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hlm 26.

¹⁶Siswanto Sunarsono, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012 hlm.7.

“Perlindungan korban dilakukan meliputi perlindungan psikis dan fisik. Norma perlindungan ini diukur dari tingkat ancaman selain terhadap pihak terlapor juga kepada pejabat penegak hukum baik itu polisi, jaksa, hakim, pengacara maupun wartawan media cetak maupun elektronik yang meliput suatu peristiwa pidana yang memiliki resiko tinggi..”

Bahwa perlindungan terhadap korban itu meliputi fisik dan psikis dari korban.

Menurut Barda Nawawi Arief ¹⁷:

“Upaya Perlindungan terhadap korban *trafficking* dan eksploitasi anak merupakan hal yang kompleks karena berisikan dengan berbagai aspek kehidupan, maka diperlukan kesadaran dan peran serta seluruh masyarakat, penyelenggara negara dan aparat penegak hukum. Selama ini masalah *trafficking* dan eksploitasi anak hanya berfokus pada masalah yang sudah terjadi dan penyelesaian terhadap penanganan kasus. Sementara upaya pencegahan dan pemenuhan terhadap hak anak kurang menjadi perhatian. KUHP yang berlaku saat ini tidak atau kurang memberi perhatian pada korban. Tidak ada pidana ganti rugi dalam KUHP, baik sebagai pidana pokok maupun sebagai pidana tambahan.”

Masih kurangnya perlindungan bagi korban, karena selama ini masalah tersebut hanya terfokus pada suatu masalah yang sudah pernah terjadi. Namun upaya pencegahan dan perlindungan kurang menjadi prioritas utama.

Menurut J.E.Sahetapy¹⁸:

“Anak korban kejahatan selain dilindungi juga harus di berikan pelayanan. Pelayanan anak korban kejahatan adalah suatu kegiatan pengembangan hak asasi manusia dan kewajiban asasi manusia.”

¹⁷Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan kejahatan*, Citra Aditya, Bandung, 2001, hlm 56-57.

¹⁸J.E Sahetapy dll, *Karya Ilmiah Para Pakar Hukum Bunga Rampai Viktimisasi*, Eresco Bandung, Bandung, 1995, hlm 135.

Anak yang merupakan korban dari suatu tindak pidana berhak mendapatkan pelayanan, karena untuk memulihkan keadaan fisik dan psikis anak tersebut.

Menurut Bambang Waluyo¹⁹:

“Hubungan korban dengan kejahatan adalah pihak yang menjadi korban sebagai akibat kejahatan”

Menurut Rena Yulia²⁰ :

“Viktimologi adalah suatu pengetahuan ilmiah/studi yang mempelajari suatu viktimisasi (kriminal) sebagai suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial. Viktimologi berasal dari kata *victima* yang berarti korban dan logos yang berarti pengetahuan ilmiah/studi”

Menurut Chaerudin dan Syarif Fadillah²¹:

Manfaat viktimologi adalah :

1. Viktimologi mempelajari hakikat siapa itu korban dan yang menimbulkan korban
2. Viktimologi memberikan sumbangan dalam mengerti lebih baik tentang korban akibat tindakan manusia yang menimbulkan penderitaan fisik, mental dan sosial;
3. Viktimologi memberikan keyakinan bahwa setiap individu mempunyai hak dan kewajiban untuk mengetahui mengenai bahaya yang dihadapinya;
4. Viktimologi juga memperhatikan masalah viktimisasi tidak langsung;
5. Viktimologi memberikan dasar pemikiran untuk masalah penyelesaian viktimisasi kriminal.

¹⁹Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 18.

²⁰Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm. 75.

²¹Chaerudin dan Syarif Fadillah, *Korban Kejahatan dalam Prespektif Viktimologi & Hukum Pidana Islam*, Grahadhika Press, Jakarta, 2004, hlm. 10-11.

Menurut Dikdik M Arief Mansyur dan Elisatris Gultom²²:

“Viktimologi bermanfaat bagi kinerja aparat penegak hukum, seperti aparat kepolisian, Kejaksaan dan kehakiman”

F. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan penulis adalah sebagai berikut :

1. Spesifikasi Penelitian

Adapun jenis penelitian yang dipakai dalam penulisan skripsi ini mengutip dari Soejono Soekanto berdasarkan deskriptif analitis.²³

“Deskriptif analitis yaitu berupa penggambaran, penelaahan dan penganalisaan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dalam hukum pidana”.

Metode ini akan memberikan gambaran yang sistematis, faktual, serta akurat tentang fakta-fakta serta sifat objek penelitian mengenai Pertanggung Jawaban Pidana bagi Anak Berstatus Muncikari dalam Tindak Pidana Perdagangan Seks Komersial Anak di Hubungkan dengan Ketentuan Perundang-Undangan untuk kemudia dianalisis.

2. Metode Pendekatan

Penelitian yang dipakai dalam penulisan skripsi ini mengutip dari Soejono Soekanto menggunakan metode yuridis normatif yaitu:²⁴

²²Dikdik M. Arief mansyur&Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan korban Kejahatab antara Norma dan Realita*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm.39

²³Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, 2007, hlm.14.

“Yuridis normatif adalah dengan menginventarisasi, mengkaji, dan meneliti data sekunder berupa peraturan perundangundangan, asas-asas hukum, pengertian-pengertian hukum”.

Pendekatan ini dimaksudkan untuk membahas aspek hukum yang berhubungan dengan Pertanggung Jawaban Pidana bagi Anak Berstatus Muncikari dalam Tindak Pidana Perdagangan Seks Komersial Anak di Hubungkan dengan Ketentuan Perundang-Undangan.

3. Tahap Penelitian

Data yang dikumpulkan dalam penulisan skripsi ini diperoleh melalui cara sebagai berikut :

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan ini merupakan data sekunder yaitu dimana pada bagian ini penulis akan berusaha mempelajari berbagai teori melalui buku-buku, perundang-undangan, majalah-majalah, surat kabar, bulletin maupun makalah-makalah yang ada hubungannya dengan pokok permasalahan dalam tulisan ini, yang terdiri dari :

1) Bahan hukum primer yang sifatnya mengikat masalah-masalah yang akan di teliti berupa peraturan perundang-undangan antara lain :

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 beserta amandemennya;

²⁴Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pres, Jakarta, 1984, hlm.53.

- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - c) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
 - d) Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa bahan hukum primer, terdiri dari literatur yang berkaitan dengan topik penelitian yaitu tentang Pertanggung Jawaban Pidana bagi Anak Berstatus Muncikari dalam Tindak Pidana Perdagangan Seks Komersial Anak di Hubungkan dengan Ketentuan Perundang-Undangan, seperti artikel, makalah dan hasil seminar.
- 3) Bahan-bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder, seperti ensiklopedia, kamus-kamus hukum, kamus bahasa inggris, situs di internet dan bahan lain yang menunjang penelitian.
- b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)
- Tahap ini dilakukan untuk memperoleh data primer sebagai penunjang data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari masyarakat atau berbagai pihak antara lain lembaga yang terkait, dengan permasalahan yang diteliti berupa kasus, tabel dan wawancara.

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara membaca, mencatat, mengutip data dari buku-buku, peraturan perundang-undangan maupun literatur lain yang berkaitan dengan permasalahan dan pembahasan dalam penulisan ini, serta melalui kasus, tabel dan wawancara.

5. Alat Pengumpul Data

Alat adalah sarana yang dipergunakan. Alat pengumpulan data yang akan dipergunakan di dalam suatu penelitian hukum, senantiasa tergantung pada ruang lingkup dan tujuan penelitian hukum yang akan dilakukan. Menurut Johny Ibrahim²⁵:

“Bahwa setiap penelitian hukum senantiasa harus didahului dengan penggunaan studi dokumen atau bahan pustaka”

Karena dalam melakukan suatu penelitian harus didasari dengan data data yang bersifat akurat dengan cara studi dokumen dan studi lapangan.

a. Data kepustakaan

Alat pengumpul data hasil penelitian kepustakaan berupa catatancatatan hasil inventarisasi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

²⁵Johny Ibrahim, *Teori Metode dan Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2007, hlm. 66.

b. Data Lapangan

Alat pengumpul data hasil penelitian lapangan berupa contoh kasus, tabel pertanyaan untuk berwawancara dengan menggunakan alat perekam sebagai alat penyimpan data.

6. Analisis Data

Data dari hasil penelitian kepustakaan dan data dari hasil penelitian lapangan akan dianalisis secara yuridis kualitatif.

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro²⁶:

“Yuridis kualitatif yaitu suatu cara menganalisis yang tidak menggunakan statistika dan tidak berhubungan dengan angka-angka, melainkan dengan cara melakukan penggabungan data hasil penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan lalu menganalisisnya apakah telah sesuai dengan hukum. Data tersebut kemudian diolah dan dicari keterkaitan serta hubungannya antara satu dengan yang lainnya, sehingga dapat diperoleh hasil yang sesuai dengan tujuan penelitian.”

Dalam penelitian ini, hanya menggunakan penggabungan data hasil penelitian kepustakaan dan wawancara, tidak menggunakan data statistik berupa angka.

7. Lokasi Penelitian

Dalam pelaksanaan penelitian pada penulisan hukum ini, penulis akan memperoleh data-data dengan mengunjungi tempat-tempat sebagai lokasi penelitian, diantaranya adalah :

²⁶Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 116.

a. Penelitian Kepustakaan, berlokasi di :

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Jalan Lengkong Dalam Nomor 17 Bandung;
- 2) Badan Perpustakaan Daerah, Jalan Soekarno Hatta Nomor. 621 Bandung.

b. Penelitian Lapangan, berlokasi di :

- 1) POLRES Cimahi Jalan. Jend H. Amir Machmud No. 333, Cigugur Tengah, Cimahi Tengah, Kota Cimahi, Jawa Barat 40522;
- 2) POLRESTABES, Jl. Merdeka Nomor 18-21, Babakan Ciamis, Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat 40117.